

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian Negara atau yang sering disingkat BKN, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Badan Kepegawaian Negara dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan Kepegawaian Negara memiliki visi menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025. Misi yang diemban Badan Kepegawaian Negara yaitu, mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara, mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian, dan mengembangkan manajemen internal BKN.

Mengacu pada poin ketiga dari misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Negara dalam mengembangkan manajemen internalnya, diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola barang-barang milik negara yang ada di internal BKN. Faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu instansi terletak dalam penatausahaan barang milik negara yang dimilikinya (Risma 2017). Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang-barang milik negara yang ada di internal BKN masih dijumpai ketidakefisienan dan ketidakefektifan proses bisnisnya karena masih menggunakan proses manual yang meliputi, proses permintaan barang baru, proses melaporkan kerusakan barang yang ada pada unit tertentu dan proses *monitoring* barang-barang yang ada di internal lembaga. Proses bisnis lama pengajuan permintaan barang baru dan pelaporan kerusakan barang diawali dengan pembuatan surat dari unit di masing-masing gedung. Unit juga harus berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain untuk mengirimkan dan mengecek hasil surat yang telah diajukan.

Proses bisnis yang selama ini dilakukan secara manual tentu membutuhkan banyak sumber daya manusia dan memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga proses tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu dikhawatirkan terjadinya perbedaan data antara biro umum dengan unit di tiap gedung karena belum adanya sistem yang saling terintegrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut dibuatlah sebuah aplikasi pengelolaan barang milik negara berbasis web yang menyesuaikan kebiasaan pengguna dan diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai kesulitan dalam dokumentasi dan pengelolaan barang-barang milik negara ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Web di Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Menyediakan proses permintaan barang baru bagi unit di tiap gedung.
2. Menyediakan proses pelaporan kerusakan barang yang ada di tiap gedung.



3. Memfasilitasi pendataan barang-barang milik negara yang ada di Badan Kepegawaian Negara.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Web di Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Unit dapat dengan mudah mengajukan permintaan barang baru.
2. Unit dapat dengan mudah melaporkan kerusakan barang yang ada pada unit tersebut.
3. Mempersingkat waktu dalam mengajukan proses pengajuan permintaan barang dan pelaporan kerusakan barang

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan pembuatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Web di Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Aplikasi yang dibuat ini hanya berbasis web, tidak tersedia untuk berbasis *mobile*.
2. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh dua pengguna, yaitu biro umum dan unit di tiap gedung.
3. Sistem ini tidak menyediakan fitur *daftar* atau *sign up* untuk unit, dikarenakan akun untuk unit disediakan oleh biro umum.